

ANALISIS PENGAJUAN KREDIT DAN PENGENDALIAN INTERN PADA PT. BANK BNI Tbk CABANG KABANJAHE

Yunita Sari Rioni, SE, M.Si, Ak

Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

Dwi Saraswati, S.Pd, M.Si

Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

Rusyda Nazirah Yunus, S.S, M.Si

Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan sistem pengajuan kredit dan pengendalian intern yang dilaksanakan oleh PT. Bank BNI Tbk Cabang Kabanjahe. Data penelitian ini diperoleh dari observasi serta wawancara langsung dengan pihak yang terkait, dan menggunakan metode kualitatif (analisis deskriptif). Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa sistem pengajuan kredit PT. Bank BNI Tbk Cabang Kabanjahe terdiri atas beberapa prosedur, yaitu permohonan kredit, penyelidikan dan analisis kredit, persetujuan kredit, pencairan kredit, dan pelunasan kredit, serta telah didukung oleh penerapan sistem pengendalian intern. Adapun pengendalian intern PT. Bank BNI Tbk Cabang Kabanjahe sudah efektif, masing-masing unit atau divisi memiliki tugas dan wewenang yang jelas sehingga memudahkan para karyawan untuk melakukan tugasnya dengan benar dan baik. Serta telah mencapai tujuan dari pengendalian intern pemberian kredit yaitu, keandalan pelaporan keuangan pemberian kredit, efektivitas dan efisiensi pemberian kredit, ketaatan terhadap hukum dan peraturan kredit.

Kata Kunci : Sistem Pengajuan Kredit, Pengendalian Intern

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah keamanan atas kredit yang diberikan di PT. Bank BNI Cabang Kabanjahe merupakan masalah yang harus diperhatikan, karena adanya risiko yang timbul dalam sistem pemberian kredit. Permasalahan ini bisa dihindari dengan adanya suatu pengendalian intern yang memadai dalam bidang perkreditan. Dengan kata lain diperlukan suatu pengendalian intern yang dapat menunjang efektivitas sistem pemberian kredit.

Pentingnya dilakukan penelitian ini karena sistem pengajuan kredit dan pengendalian intern dalam proses pemberian kredit ini sangat diperlukan agar memudahkan para nasabah dalam proses pengajuan kredit dan memberikan pedoman yang jelas atas syarat-syarat pengajuan kredit tersebut. Selain itu, agar tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan sistem, maka diperlukan suatu pengendalian intern sebagai fungsi kontrol dan pengendali dari sistem tersebut, sehingga sistem yang sudah didesain dan diimplementasikan dengan baik tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang dapat merugikan perusahaan.

B. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini yang menjadi perumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana sistem pengajuan kredit yang diterapkan oleh PT. Bank BNI Cabang Kabanjahe?

2. Bagaimana sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh PT. Bank BNI Cabang Kabanjahe?
3. Apakah sistem pengajuan kredit dan pengendalian intern yang diterapkan telah berjalan efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem pengajuan kredit yang diterapkan oleh PT. Bank BNI Cabang Kabanjahe .
2. Untuk mengetahui sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh PT. Bank BNI Cabang Kabanjahe.
3. Untuk mengetahui sistem pengajuan kredit dan pengendalian intern yang diterapkan telah berjalan efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Sistem

Pengertian system adalah suatu kesatuan, baik obyek nyata atau abstrak yang terdiri dari berbagai komponen atau unsur yang saling berkaitan, saling tergantung, saling mendukung, dan secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien.

Menurut Harijono Djojodihardjo, pengertian sistem adalah gabungan obyek yang memiliki hubungan secara fungsi dan hubungan antara setiap ciri obyek, secara keseluruhan menjadi suatu kesatuan yang berfungsi.

Menurut Indrajit, pengertian sistem adalah kumpulan dari komponen-komponen yang saling memiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya.

Menurut Jogianto, definisi sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang menggambarkan berbagai kejadian dan kesatuan yang nyata, seperti tempat, benda dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi.

2. Kredit

Pengertian Kredit adalah pemberian penggunaan suatu uang atau barang kepada orang lain di waktu tertentu dengan jaminan atau tanpa jaminan, dengan pemberian jasa atau bunga atau tanpa bunga.

Menurut UU. No. 10 Tahun 1998, pengertian kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Pengertian kredit menurut pendapat Brymont P. Kent adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang pada waktu sekarang.

Menurut Amir. R. Batubara, pengertian kredit adalah pemberian prestasi yang kontra prestasinya akan terjadi sejumlah uang di masa yang akan datang

a). Fungsi Kredit

Kredit di awal perkembangan fungsinya untuk merangsang kedua belah pihak untuk saling menolong dengan tujuan pencapaian kebutuhan, baik itu dalam bidang

usaha atau kebutuhan sehari-hari. Kredit dapat memenuhi fungsinya jika secara sosial ekonomis baik bagi debitur, kreditur, atau masyarakat membawa pengaruh yang lebih baik.

Dari manfaat yang nyata dan juga manfaat yang diharapkan, maka kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan memiliki fungsi. Macam-macam fungsi kredit adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan daya guna uang
2. Meningkatkan kegairahan berusaha
3. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
4. Merupakan salah satu alat stabilitas perekonomian
5. Meningkatkan hubungan internasional
6. Meningkatkan daya guna dan juga peredaran barang
7. Meningkatkan pemerataan pendapatan
8. Sebagai motivator dan dinamisator kegiatan perdagangan dan perekonomian
9. Memperbesar modal dari perusahaan
10. Dapat meningkatkan IPC (income per capita) masyarakat
11. Mengubah cara berfikir dan tindakan masyarakat agar bernilai ekonomis

b). Unsur-Unsur Kredit

Unsur-unsur yang terdapat dalam pemberian pada fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan, Keyakinan adalah suatu keyakinan terhadap pemberi kredit untuk diberikan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dalam jangka waktu kredit. Bank memberikan kepercayaan atas dasar melandasi mengapa suatu kredit dapat berani di kucurkan.
2. Kesepakatan, Kesepakatan dalam suatu perjanjian yang setiap pihak (si pemberi kredit kepada si penerima kredit) menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan berada dalam suatu akad kredit dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.
3. Jangka Waktu, Dari jangka waktu yang telah disepakati bersama mengenai dari pemberian kredit oleh pihak bank dan pelunasan kredit oleh pihak nasabah debitur.
4. Risiko, Dalam menghindari resiko buruk dalam perjanjian kredit, sebelumnya telah dilakukan perjanjian pengikatan angunan atau jaminan yang dibebankan kepada pihak nasabah debitur atau peminjam.
5. Prestasi, Prestasi merupakan objek yang berupa bunga atau imbalan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah debitur.

c). Tujuan Kredit

Hadirnya kredit dan dengan berbagai macam fungsinya. Tujuan kredit adalah sebagai berikut.

1. Mendapatkan pendapatan bank pada hasil bunga kredit yang diterima
2. Memproduktifkan dan memanfaatkan dana-dana yang ada
3. Menjalankan pada kegiatan operasional bank
4. Menambah modal kerja di perusahaan
5. Mempercepat lalu lintas pembayaran
6. Meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan dari masyarakat

d). Macam-Macam Kredit

Macam-macam kredit atau jenis-jenis kredit diklasifikasikan antara lain sebagai berikut.

1). Macam-Macam Kredit Berdasarkan Kelembagaan

1. Kredit Perbankan, adalah kredit yang diberikan kepada masyarakat oleh bank negara atau swasta untuk kegiatan usaha atau konsumsi
2. Kredit Likuiditas, ialah kredit yang diberikan kepada bank-bank beroperasi di Indonesia oleh bank-bank sentral yang difungsikan sebagai dana dalam membiayai kegiatan perkreditannya.
3. Kredit Langsung, yaitu kredit yang diberikan kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah (kredit program) oleh BI.
4. Kredit Pinjaman Antarbank, adalah kredit yang diberikan oleh bank yang kelebihan dana kepada bank yang kekurangan dana.

2). Macam-Macam Kredit Berdasarkan Jangka Waktu

1. Kredit Jangka Pendek (Short term loan), adalah kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun. Bentuknya berupa kredit direkening koran, kredit penjualan, kredit wesel, dan kredit pembeli serta kredit modal kerja.
2. Kredit Jangka Menengah (Medium term loan), ialah kredit yang jangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun.
3. Kredit Jangka Panjang, adalah kredit yang memiliki waktu lebih dari tiga tahun. Umumnya berupa kredit investasi yang didedikasikan dengan tujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.

3). Macam-Macam Kredit Berdasarkan tujuan atau Penggunaannya

1. Kredit Konsumtif, adalah kredit yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sendiri dan dengan keluarganya, misalnya kredit mobil, dan rumah untuk dirinya dan keluarganya. Kredit ini sangat tidak produktif
2. Kredit Modal Kerja atau Kredit Perdagangan, ialah kredit yang digunakan untuk menambah modal usaha debitur. Kredit produktif
3. Kredit Investasi, adalah kredit yang digunakan untuk investasi produktif, tetapi baru menghasilkan jangka waktu yang relatif lama. Kredit yang biasanya diberikan grace period, seperti kredit perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya.

4). Macam-Macam Kredit Berdasarkan Aktivitas Perputaran Usaha

1. Kredit Kecil, ialah kredit yang diberikan kepada penguasa kecil, misalnya KUK (Kredit usaha kecil).
2. Kredit Menengah, adalah kredit yang diberikan kepada penguasa dengan aset yang melebihi dari penguasa kecil.
3. Kredit Besar, adalah kredit yang pada dasarnya ditinjau dari segi jumlah kredit yang diterima oleh debitur.

5). Macam-Macam Kredit Berdasarkan Jaminannya

1. Kredit Tanpa Jaminan atau kredit blanko (unsecured down), adalah pemberian kredit dengan tanpa jaminan materiil (agunan fisik), pemberian sangat selektif yang ditujukan untuk nasabah besar yang telah teruji bonafiditas, kejujuran, dan ketaatannya, baik dalam transaksi perbankan maupun oleh kegiatan usaha yang dijalaninya.

2. Kredit Jaminan, ialah kredit untuk debitur yang didasarkan dari keyakinan atas kemampuan debitur dan adanya agunan atau jaminan berupa fisik (collateral) sebagai jaminan tambahan.

6). Macam-Macam Kredit Berdasarkan Macamnya

1. Kredit Aksep, ialah kredit untuk bank yang berupa pinjaman uang, seperti plafond kredit (L3 atau BMPK)-nya
2. Kredit Penjual, adalah kredit untuk penjual dan pembeli, artinya barang yang telah diterima pembayaran kemudian. Misalnya Usanse L/C,
3. Kredit Pembeli, adalah pembayaran telah dilakukan penjual, namun barangnya diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka, seperti red clause L/C.

7). Macam-Macam Kredit Berdasarkan Sektor Perekonomiannya

1. Kredit Pertanian, adalah kredit untuk perkebunan, peternakan dan perikanan
2. Kredit Pertambangan, ialah kredit untuk beraneka macam pertambangan
3. Kredit Ekspor-Import, yaitu kredit untuk eksportir dan importir macam-macam barang.
4. Kredit Koperasi, adalah kredit untuk jenis-jenis koperasi
5. Kredit Profesi, adalah kredit untuk macam-macam profesi, misalnya dokter dan guru.
6. Kredit Perindustrian, adalah kredit untuk macam-macam industri kecil, menengah dan besar.

8). Macam-Macam Kredit Berdasarkan Penarikan dan Pelunasan

1. Kredit Rekening Koran, adalah kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan yang penarikannya dengan cek, bilyet, giro atau pemindahbukuan, pelunasan dengan melakukan setoran-setoran tersebut.
2. Kredit Berjangka, ialah kredit yang penarikannya sekaligus sebesar plafondnya. Pelunasan kredit dengan cara setelah jangka waktunya habis yang dapat dilakukan dengan mencicil atau perjangjian.

9). Macam-Macam Kredit Berdasarkan Cara Pemakaiannya

1. Kredit Rekening Koran Bebas. adalah kredit yang debitur menerima seluruh dari kreditnya dengan bentuk rekening koran kepadanya diberikan blangko cheque dan rekening korannya pinjamannya diisi berdasarkan besarnya kredit yang diberikan, debitur bebas melakukan penarikan selama kredit berjalan.
2. Kredit Rekening Koran Terbatas, ialah kredit dengan adanya pembatasan tertentu bagi nasabah dalam melakukan penarikan uang rekeningnya. seperti pemberian kredit dengan uang giral dan perubahannya menjadi uang cartal dilakungan berangsur-angsur.
3. Kredit Rekening Koran Aflopend, yaitu penarikan kredit yang dilakukan dengan arti maksimum kredit di waktu penarikan ditambah sebenarnya dengan digunakan oleh nasabah.
4. Revolving Kredi, adalah sistem penarikan kredit sama dengan cara rekening koran bebas dengan masa penggunaan satu tahun, akan tetapi cara pemakaiannya berbeda.

5. Term Loans, ialah sistem penggunaan dan pemakaian kredit yang fleksibel artinya nasabah dapat bebas menggunakan uang kredit untuk keperluan apa saja dan bank tidak mau tentang hal itu.

3. Prinsip Pemberian Kredit

Prinsip-Prinsip/Syarat Kredit Dalam mendapatkan kredit, terdapat macam-macam prosedur yang harus dilewati yang ditentukan oleh bank atau lembaga keuangan agar berjalan dengan baik dan sehat terdapat sebutan 6 C yang merupakan prinsip-prinsip kredit antara lain sebagai berikut...

1. **Character (kepribadian/watak)**
Kepribadian adalah sifat atau watak pribadi dari debitur untuk mendapatkan kredit, seperti kejujuran, sikap motivasi usaha, dan lain sebagainya.
2. **Capacity (kemampuan)**
Kemampuan adalah kemampuan modal yang dimiliki untuk memenuhi kewajiban tepat pada waktunya, khususnya dalam likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan soliditasnya.
3. **Capital (modal)**
Modal adalah kemampuan debitur dalam melaksanakan kegiatan usaha atau menggunakan kredit dan mengembalikannya.
4. **Collateral (jaminan)**
Jaminan adalah jaminan yang harus disediakan untuk pertanggung jawaban jika debitur tidak dapat melunasi utangnya.
5. **Condition of Economic (kondisi ekonomi)**
Kondisi ekonomi adalah keadaan ekonomi suatu negara secara menyeluruh dan memberikan dampak kebijakan pemerintah di bidang moneter, terutama berhubungan dengan kredit perbankan
6. **Constrain (batasan atau hambatan)**
Batasan atau hambatan adalah penilaian debitur yang dipengaruhi oleh hambatan yang tidak memungkinkan seseorang untuk usaha di suatu tempat.

Walaupun terdapat prinsip-prinsip kredit yang dikenal dengan 6 C, terdapat juga prinsip-prinsip kredit yang dikenal dengan 4 P antara lain sebagai berikut...

1. **Personality**
Personality adalah penilaian bank mengenai kepribadian peminjam, misalnya riwayat hidup, hobinya, keadaan keluarga (istri atau anak), social standing (pergaulan di masyarakat serta bagaimana masyarakat mengenai diri si peminjam dan sebagainya).
2. **Purpose**
Purpose adalah bank menilai peminjam mencari dana mengenai tujuan atau keperluan dalam penggunaan kredit, dan apakah tujuan dari penggunaan kredit itu sesuai dengan line of business kredit bank bersangkutan.
3. **Payment**
Payment adalah untuk mengetahui kemampuan dari debitur mengenai pengembalian pinjaman yang diperoleh dari prospek kelancaran penjualan dan pendapatan sehingga diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman dapat ditinjau waktu jumlahnya.
4. **Prospect**
Prospect adalah harapan usaha di masa yang akan datang dari calon debitur.

4. Pengendalian Intern

Pengendalian internal adalah penggunaan semua sumber daya perusahaan untuk meningkatkan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi berbagai aktivitas dengan tujuan untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai. Saran pengendalian ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada, bentuk organisasi, kebijakan, sistem prosedur, instruksi, standar, komite, bagan akun, perkiraan, anggaran, jadwal, laporan, catatan, daftar auditing, metode, rencana, dan auditing internal.

Pengendalian intern yang ada dalam perusahaan bukanlah dimaksudkan untuk meniadakan semua kemungkinan terjadinya kesalahan atau penyelewengan, namun diadakan untuk menekan terjadinya kesalahan dan penyelewengan supaya dapat diatasi dengan cepat dan tepat. Pengendalian intern (*internal control*) adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

a) Tujuan Pengendalian Intern

Tujuan pokok dari sistem pengendalian intern dalam suatu perusahaan dapat dibedakan dalam empat tujuan pokok, yaitu :

1. Menjaga kekayaan organisasi
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
3. Mendorong efisiensi operasi perusahaan
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

b) Unsur-unsur Pengendalian Intern

Pengendalian intern terdiri dari : lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan.

c) Prosedur Pengendalian Intern

Prosedur pengendalian intern yang baik terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengawasan tugas yang cukup memadai meliputi :
 - a. Pemisahan pemegang aktiva dari akuntansi.
 - b. Pemisahan otoritas transaksi pemegang aktiva yang bersangkutan.
 - c. Pemisahan tanggung jawab operasi dan tanggung jawab pembukuan.
 - d. Pemisahan tugas dalam pemrosesan dan elektronik.
2. Otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas.
3. Dokumen dan catatan yang memadai.
4. Pengendalian fisik atas aktiva dan pencatatan.
5. Pengecekan independen atas pelaksanaan.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis, Obyek, Lingkup, dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan disini bersifat kualitatif, karena tidak berhubungan dengan jumlah atau angka, melainkan mengenai analisis pengajuan kredit dan pengendalian intern pada proses pemberian kredit PT. Bank BNI Cabang Kabanjahe. Pada penelitian ini obyek tersebut adalah PT. Bank BNI Cabang Kabanjahe. Lingkup penelitian ini memfokuskan pada sistem pengajuan kredit dan pengendalian intern yang meliputi syarat-syarat kredit, prosedur pengajuan kredit, analisa kredit, dan pengawasan kredit di PT. Bank BNI Cabang Kabanjahe. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yang meliputi : Observasi, wawancara, dan dokumentasi.

B. Pengujian Data

Pengolahan data hasil penelitian ini menggunakan alat analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan suatu sistem atau proses. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sistem atau proses yang tengah berlangsung pada saat studi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa analisis deskriptif ini dimaksudkan untuk menguraikan atau memaparkan hasil penelitian untuk kemudian diadakan interpretasi berdasarkan landasan teori yang telah disusun.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan bagian kredit pada PT. Bank BNI Tbk Cabang Kabanjahe untuk mengetahui Bagaimana sistem pengajuan kredit yang diterapkan oleh PT. Bank BNI Cabang Kabanjahe, Bagaimana sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh PT. Bank BNI Cabang Kabanjahe dan Apakah sistem pengajuan kredit dan pengendalian intern yang diterapkan telah berjalan efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

B. PEMBAHASAN

1. Prosedur Pemberian Kredit PT. Bank BNI Tbk

- 1) Marketing *Relationship Manager* (RM) atau *Junior Relationship Manager*(JRM) kredit memberikan penawaran kredit kepada calon debitur.
- 2) Calon debitur memberikan berkas pengajuan kredit perorangan berupa fotokopi KTP, fotokopi Akta Nikah, fotokopi NPWP, fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan Tanda Daftar Perusahaan. Sedangkan kredit Badan Hukum berupa fotokopi KTP pengurus, fotokopi akta pendirian, fotokopi anggaran dasar, fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan Tanda Daftar Perusahaan.
- 3) Pihak bank melakukan *BI checking*
- 4) Pihak bank akan menilai jaminan agunan yang dimiliki calon debitur yang dilakukan oleh *Credit Investigator (CI) atau Independen Appraisal*
- 5) Jika *BI checking* bagus (tidak ada kredit bermasalah) dan jaminan mengcover maka pihak bank akan melakukan Analisa Yuridis yang dilakukan oleh bagian Legal
- 6) Setelah Analisa Yuridis selesai, maka marketing melakukan Komite Kredit yang dihadiri oleh *Relationship Manager* (RM) atau *Junior Relationship Manager* (JRM), Penyelia Kredit dan Pimpinan Cabang.
- 7) Jika hasil dalam Komite Kredit tersebut calon Debitur diterima oleh pihak bank, maka dapat dilakukan *pendroppingan* kredit
- 8) Sebelum *dropping* kredit tersebut, calon debitur harus menyediakan dana awal untuk biaya asuransi ,biaya notaris, biaya provisi, dan biaya administrasi kredit
- 9) Bagian Administrasi Laporan (ADML) melakukan input master pinjaman dan Administrasi Kredit (ADMK) melakukan otorisasi master pinjaman tersebut yang akan dikreditkan ke rekening debitur, sehingga debitur dapat menggunakan menggunakannya sesuai dengan keperluannya.

2. Sistem Pengendalian Intern PT. Bank BNI Tbk

a) Personil yang Kompeten dan Dapat Dipercaya

Pengendalian internal dipengaruhi oleh manajemen dan personil lain dalam suatu organisasi. Orang-orang tersebut menetapkan tujuan organisasi dan membuat mekanisme pengendaliannya, sehingga orang-orang tersebut harus yang kompeten atau

orang-orang yang mempunyai latar belakang sesuai bidangnya masing-masing, kemampuan yang memadai dan mempunyai integritas yang tinggi. Dapat ditunjukkan pada diadakannya program training pada PT. Bank BNI Tbk, dilakukan atas dasar komitmen terhadap kompetensi.

b) Pemisahan Tugas yang Memadai

Seluruh kegiatan organisasi tidak dapat dilaksanakan oleh satu orang saja sehingga diperlukan oleh beberapa orang yang menguasai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu (*the right man on the right place*). Hal ini ditunjukkan dengan adanya pembagian bidang atau divisi di bagian perkreditan pada PT. Bank BNI Tbk. Dan pemisahan tugas yang menangani permohonan kredit oleh analis kredit, supervisi kredit dan administrasi kredit.

c) Prosedur Otoritas yang Tepat

Pelaksanaan aktifitas yang dijalankan oleh semua karyawan atau karyawan harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman/kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Untuk otorisasi suatu transaksi harus dilakukan oleh supervisi yang sudah mendapat penunjukan secara tertulis. Ditandai dengan adanya pelimpahan tanggung jawab, pendelegasian wewenang serta adanya kebijakan-kebijakan dan pengawasan melalui peraturan-peraturan PT. Bank BNI Tbk.

d) Dokumen dan Catatan yang Memadai

Untuk semua transaksi harus disertai dengan dokumen dan pencatatan yang memadai sebagai kelengkapan keabsahan transaksi tersebut. Dokumen dan catatan harus diverifikasi terlebih dahulu oleh aparat yang sudah ditunjuk dan kemudian disimpan di tempat yang aman dan memadai. Hal ini dapat terlihat dari lengkapnya persyaratan kredit yang diperlukan oleh PT. Bank BNI Tbk.

e) Kontrol Fisik dan Catatan

Semua aset perusahaan harus dicatat dalam pembukuan dan daftar inventaris oleh orang yang sudah mendapat penunjukan dan secara berkala harus dilakukan *stock opname* (inventarisasi) untuk memastikan bahwa inventaris tersebut masih sesuai. Dapat ditunjukkan dengan Pimpinan Cabang yang berhak memberikan keputusan permohonan kredit yang dipertimbangkan dahulu melalui analisa yang dilakukan analis kredit. Kemudian dilaksanakannya sistem informasi baru yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menggabungkan, mencatat, menganalisis serta melaporkan transaksi yang sesuai dengan kelengkapannya dan ketepatannya.

9) Pemeriksaan Pekerjaan secara Independen

Setiap aktifitas yang dijalankan harus diawasi oleh bagian pengawasan yang sifatnya independen sehingga hasil dari pengawasan tersebut akan lebih obyektif. Dapat dilihat dengan adanya kebijakan dan peraturan pemberian kredit serta adanya otorisasi oleh pejabat yang berwenang. Demikian pula dengan antisipasi risiko kredit macet, PT. Bank BNI Tbk berupaya mentaati peraturan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit yang merupakan prosentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank. Selain itu adanya bagian Customer Call dan Customer Visit dalam pemantauan kredit secara berkala.

Terdapat beberapa Efektifitas Pengendalian Intern yaitu:

1. Efektifitas Pengendalian Intern Pemberian Kredit terhadap Komponen Kredit

a). Lingkungan Pengendalian

Dalam melaksanakan proses pemberian kredit, bank telah menerapkan unsur-unsur :

1). Integritas dan Nilai Etika

Integritas dan nilai etika pada PT. Bank BNI Tbk telah diterapkan, hal ini dapat dilihat dengan adanya kebijakan dan peraturan pemberian kredit serta adanya otorisasi oleh pejabat yang berwenang.

2). Komitmen terhadap Kompetensi

PT. Bank BNI Tbk memiliki rasa tanggung jawab pada tingkat kecakapan karyawan dalam bekerja sesuai dengan profesinya. Hal ini dapat terlihat dari adanya program *training*, dilakukan atas dasar komitmen terhadap kompetensi.

3). Dewan Direksi dan Komite Kredit

Dilakukannya Komite Kredit oleh Pejabat Kredit yang bertanggung jawab secara langsung pada Dewan Direksi.

4). Filosofi Manajemen dan Gaya Operasi

Filosofi dalam bidang perkreditan berdiri di atas kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, karyawan bank harus menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diberikan kepada bank. Dengan kata lain, falsafah manajemen yang dipegang oleh Bank BNI adalah melayani kredit kepada seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan gaya operasi yang diterapkan merupakan suatu tindakan partisipatif, hal ini tercermin dari peletakan perencanaan dan pengendalian ditangan manajemen menengah ke bawah. Maka dapat dikatakan, falsafah manajemen dan gaya operasi yang diterapkan oleh PT. Bank BNI Tbk telah memadai.

5). Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada PT. Bank BNI Tbk telah disusun dengan baik yang ditandai dengan adanya pembagian bidang di bidang perkreditan.

6). Pelimpahan Wewenang dan Tanggung Jawab

Pelimpahan otorisasi dan tanggung jawab pada PT. Bank BNI Tbk cukup memadai, terlihat dari adanya pelimpahan tanggung jawab, pendelegasian wewenang serta adanya kebijakan-kebijakan yang dilengkapi tanggung jawab serta pengawasannya melalui peraturan-peraturan.

7). Kebijakan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia

Komponen kebijakan dan pelatihan SDM telah diterapkan memadai oleh PT. Bank BNI Tbk. Hal ini terbukti dengan adanya sistem penerimaan karyawan, pendidikan dan pelatihan serta mutasi dan promosi jabatan sebagai penghargaan terhadap prestasi karyawan.

b). Penaksiran Risiko

Komponen penaksiran risiko telah dilaksanakan dengan baik, artinya PT. Bank BNI Tbk sangat memperhatikan risiko yang berkaitan dengan prosedur perkreditan seperti risiko yang timbul karena penempatan karyawan baru, pertumbuhan pemberian kredit, investasi, teknologi baru, serta adanya perluasan kegiatan operasional bank dan penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang baru. Demikian pula denganantisipasi risiko kredit macet, PT. Bank BNI Tbk berupaya mentaati peraturan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang merupakan prosentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank.

c). Aktivitas Pengendalian

- 1) Pemisahan tugas yang memadai terlihat dari adanya pemisahan tugas yang menagani permohonan kredit oleh analis kredit, supervisi kredit dan administrasi kredit.
- 2) Pendelegasian wewenang secara wajar atas transaksi dan aktivitas, dalam hal ini hanya Pimpinan Cabang yang berhak memutuskan permohonan kredit yang

harus dipertimbangkan terlebih dahulu atas analisa yang telah dilakukan oleh analis kredit.

- 3) Dokumen dan catatan yang memadai telah dilakukan oleh PT. Bank BNI Tbk, hal ini dapat terlihat dari lengkapnya persyaratan kredit yang diperlukan, sehingga akan terlaksana keseragaman dalam penanganan proses pemberian kredit.

d). Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi pada PT. Bank BNI Tbk telah dilaksanakan dengan baik dan memadai. Hal ini terlihat dengan dilaksanakannya sistem informasi baru yang bertujuan untuk dapat mengidentifikasi, menggabungkan, mencatat, menganalisis serta melaporkan transaksi yang sesuai dengan kelengkapannya dan ketepatannya juga diikhtisarkan dengan benar dan tepat.

e). Pemantauan

Pemantauan aktivitas kredit PT. Bank BNI Tbk telah memadai, karena PT. Bank BNI Tbk telah melakukan aktivitas pemantauan kredit dalam bentuk *Customer Call* dan *Customer Visit*.

2. Efektifitas Pengendalian Intern Pemberian Kredit terhadap Tujuan Pengendalian Intern

a). Keandalan Pelaporan Keuangan Pemberian Kredit

Laporan pemberian kredit selalu didukung oleh bukti dan otorisasi dari pihak yang berwenang sehingga mudah ditelusuri jika terjadi kesalahan penyimpangan. Dalam pemberian kredit diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip dan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan adanya prinsip 5C dan prosedur dalam pemberian kredit dimulai dari tahap persetujuan kredit hingga tahap pencairan kredit sesuai dengan prosedur yang telah ada dan diharapkan tidak terjadi penyimpangan.

b). Efektifitas dan Efisiensi Pemberian Kredit

Pemberian kredit PT. Bank BNI Tbk cukup efektif, selalu mencapai target yang dianggarkan. Selain itu, PT. Bank BNI Tbk melakukan pengendalian dan pengamanan kredit dengan tujuan agar kredit yang diberikan benar-benar sesuai dengan tujuannya.

c). Ketaatan terhadap Hukum dan Peraturan Kredit

PT. Bank BNI selalu berupaya mentaati setiap peraturan dan hukum kredit yang berlaku, baik peraturan dan kebijakan yang berasal dari internal perusahaan dalam bentuk memo, maupun peraturan dan kebijakan yang berasal dari pusat atau pemerintah. Berdasarkan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa ketaatan perusahaan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku adalah telah memadai, hal ini terlihat dari ketaatan PT. Bank BNI Tbk dalam menjalankan prosedur kredit yang telah ditetapkan.

3. Aspek-aspek Penilaian PT. Bank BNI Tbk dalam Mencairkan Kredit

Dalam penilaian pihak PT. Bank BNI Tbk Cabang Kabanjahe untuk mencairkan dana kredit kepada calon nasabah/debitur menggunakan prinsip 5C, dengan aspek-aspek berikut ini :

- a). *Character*, calon debitur harus memiliki karakter yang baik, yaitu sifat-sifat pribadi, budi pekerti, pembawaan, cara hidup, keadaan keluarga, hoby dan keadaan sosial dari pemohon kredit. Dengan kata lain bagaimana baiknya dimata masyarakat dan di instansinya.

- b). *Condition of Economy*, calon debitur harus memiliki usaha yang layak untuk dibiayai.
- c). *Capital*, calon debitur harus memiliki histori *BI checking* yang baik dan menunjukkan sebelum memperoleh kredit dari kreditur bagaimana hutang-hutang orang tersebut di luar kreditur. Analisa ini sangat diperlukan guna memperkirakan apakah suatu kredit yang diberikan dapat dibayar kembali atau tidak.
- d). *Collateral*, calon debitur harus memiliki jaminan yang memadai. Penilaian terhadap *collateral* atau barang jaminan yang akan dijaminkan perlu dilakukan. Karena apabila penilaian terhadap *capital, character, condition of economy* dan *capacity* karena sesuatu hal yang meleset, maka pengembalian kredit masih terjamin. Jadi *collateral* merupakan benteng terakhir bagi keselamatan kredit yang bisa berupa barang bergerak atau barang yang tidak bergerak.
- e). *Capacity*, calon debitur harus memiliki kemampuan dan kesungguhannya dalam mengembalikan kredit.

4. Pengawasan Kredit PT. Bank BNI Tbk

Pengawasan kredit yang diterapkan PT. Bank BNI Tbk Cabang Kabanjahe adalah sebagai berikut :

- a). *Monitoring*, bagian *Customer Call* melakukan monitoring minimal 1 bulan sekali. Dan *Account Officer* akan melakukan *Customer Visit* minimal 3 bulan sekali.
- b). Apabila dalam waktu 6 bulan setelah jangka waktu kredit tidak melakukan pelunasan, maka pihak bank akan memberikan surat peringatan 3 kali untuk melakukan pembayaran atau pelunasan kredit.

5. Analisa Kredit PT. Bank BNI Tbk

Analisa kredit yang diterapkan Bank BNI adalah sebagai berikut :

- a). *Account Officer* menganalisa proposal pengajuan kredit yang dibuat oleh calon debitur.
- b). Kemudian menganalisa laporan keuangan untuk mengontrol kelayakan usaha calon debitur.
- c). Setelah menganalisa proposal pengajuan kredit dan laporan keuangan calon debitur, maka pihak bank dapat memberikan keputusan permohonan kredit apakah calon debitur tersebut layak untuk mendapatkan kredit atau tidak.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1) Pengajuan kredit yang diterapkan PT. Bank BNI Tbk Cabang Kabanjahe terdiri atas beberapa prosedur yaitu prosedur permohonan kredit, prosedur penyelidikan dan analisis kredit, prosedur persetujuan permohonan kredit, prosedur pencairan fasilitas kredit, dan prosedur pelunasan fasilitas kredit.
- 2) PT. Bank BNI Tbk Cabang Kabanjahe dalam melakukan pengawasan dapat meminimalkan resiko terjadinya kredit macet. Selain itu pihak PT. Bank BNI Tbk Cabang Kabanjahe dalam mencegah dan menangani kredit bermasalah, dengan upaya pemantauan atau monitoring usaha debitur secara berkala. Dan masing-masing unit atau divisi memiliki tugas dan wewenang yang jelas sehingga memudahkan para karyawan untuk melakukan tugasnya dengan benar dan baik.
- 3) Pemberian kredit dan pengendalian intern yang diterapkan PT. Bank BNI Tbk Cabang Kabanjahe telah efektif, karena telah mencapai tujuan dari pengendalian intern pemberian kredit yaitu, keandalan pelaporan keuangan pemberian kredit, efektivitas dan efisiensi pemberian kredit, ketaatan terhadap hukum dan peraturan kredit.

B. Saran

- 1).Terkait dengan pengawasan yang perlu mendapat perhatian adalah pelaksanaan dalam menjalankan tugas harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan, jangan sampai ada “main” dengan pihak debitur. Untuk menangani kredit bermasalah, perlu perhatian yang ekstra karena penanganan yang buruk bisa berakibat pada likuiditas bank, sehingga dapat merugikan bank secara keseluruhan.
- 2). Petugas yang menangani pemberian kredit agar lebih ditingkatkan lagi pengetahuan mengenai perbankan dan perkreditan melalui pelatihan-pelatihan dan diawasi oleh petugas yang lebih tinggi kedudukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanina, Ruzanna. 2011. *Evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern pada Proses Pemberian Kredit Mikro*. Jurnal. <http://eprints.undip.ac.id>. Semarang, diakses tanggal 19 Maret 2014.
- Pirdaus. 2012. *Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Usaha Desa Kepenuhan Barat*. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Pasir Pengaraian.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998” www.bi.go.id.